

DAFTAR PUSTAKA

- Atmarulina, R. (2009). Strategi Pengembangan Sektor Perikanan. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Basri, F. (2005). Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba (versi elektronik). Yayasan Obor Indonesia, 3-9.
- Bryson, J. M. (2011). *Strategic Planning For Public and Non Profit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*, 4th edition. Jossey-Bass, San Fransisco.
- Bryson, J. M. (2016). Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial. (M. Miftahuddin, Trans). Yogyakarta, Pustaka Pelajar. (*Original Work* diterbitkan tahun 1999).
- Bryson, J. M., dan Alston F.K (2005). *Creating and Implementing Your Strategic Plan: A Workbook for Public and Nonprofit Organizations*, 2nd edition. Jossey-Bass, San Fransisco.
- Cooper, D. R., dan Schindler, P. S. (2014). *Business research methods*, 12th edition. McGraw-Hill, New York.
- David, F.R., dan David, F. R. (2011). *Strategic Management: Concept and Cases*, 13th edition. Pearson, New Jersey.
- Firdausy, C.M. (2016). *Membangun Investasi Daerah*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2013). Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1706 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta.
- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2013). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta.
- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2018). Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta.
- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2020). Keputusan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Komite Investasi Jakarta. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta.
- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2018). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2018). Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi (PIPKI). Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2018). Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2018). Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta.

Hax, A. C., dan Majluf, N.S. (1996). *The Strategy Concept and Process: a Pragmatic Approach*, 2nd edition. Prentice Hall, New Jersey.

Hill, C., dan Jones, G. (2012). *Essentials of Strategic Management*. 3rd edition. South-Western, USA.

Hussey, David. (1998). *Strategic Management: From Theory to Implementation*, 4th edition. Butterworth-Heinemann, Oxford.

Kearns, Kevin P. (1992). *From Comparative Advantage to Damage Control: Clarifying Strategic Issues Using SWOT Analysis*. *Nonprofit Management and Leadership*, 3 (1), 11-15.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. (2018). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Jakarta.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. (2020). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Jakarta.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. (2020). Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2020 tentang Layanan Fasilitasi Penanaman Modal di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Miles, M.B., dan Huberman, A. M. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*, 2nd edition. Sage Publications, California.

Paramita, M. (2016). Strategi Membangun Kota (versi elektronik). Caritra, 98.

Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian, Jakarta.



- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Rangkuti, Freddy. (2006). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Steiss, A. W. (2003). *Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations*, 1st edition. Marcel Dekker, New York.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy : Toward Global Sustainability*, 13th edition. Pearson, New Jersey.
- Yusriadi. (2018). *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Deepublish, Yogyakarta.